

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia tahun 2019 memfokuskan dua hal utama, yang pertama yaitu upaya menjaga Kesehatan fiskal dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan resiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang. yang kedua, yaitu upaya mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Selain hal tersebut, pemerintah melakukan pengambilan strategi kebijakan fiskal pada tahun 2019 dengan mobilisasi pendapatan yang realistis, strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Sedangkan, kebijakan fiskal di tahun 2020 setelah adanya wabah pandemic Covid-19 masuk di Indonesia mengakibatkan pemerintah melakukan Kebijakan penetapan Perpu No.1/2020 dan Perpres No.

54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Sehingga di tahun 2020 setelah menyebarnya Covid-19 presiden Jokowi melakukan refocusing Anggaran Belanja Negara dan melakukan Langkah yang luar biasa (extraordinary) dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar. Selain itu prioritas APBN di tahun 2020 difokuskan pada tiga hal, yaitu menjaga Kesehatan masyarakat, melindungi daya beli masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaringan pengaman 14 KEM PPKF 2021 sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan COVID-19 dan upaya menangani dampak ekonomi dan keuangan.

2. Realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan diwaktu wabah covid-19 jika ditinjau dari teori pembiayaan fungsional (*The Fuction Finance*)

Realisasi kebijakan fiskal yang dilakukan sesuai dengan teori fungsional di tahun 2019 yaitu penggalakan peningkatan pendapatan nasional, dengan melakukan progam optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga keberlangsungan investasi, peningkatan daya saing, dan penguatan fungsi pelayanan. mengarahkan kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian agar tumbuh lebih tingi, menggairahkan investasi dan meningkatkan

ekspor. Namun, di tahun 2020 karena adanya wabah Covid-19 mengharuskan pemerintah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijakan APBN terus di fokuskan pada tiga hal, yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, membantu dunia usaha dalam proses pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat golongan tidak mampu, melalui penguatan dan perluasan jaringan pengaman 14 KEM PPKF 2021 sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Langkah tersebut dilakukan untuk akselerasi penanganan Covid-19 dan upaya mengani dampak ekonomi dan keuangan. Di tahun 2020 Penerapan pemerintah sesuai dengan teori pembiayaan fungsional yaitu dengan melakukan dukungan bagi dunia usaha, pemotongan pajak, relaksasi KUR, bantuan UMKM bagi pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19 dan progam kartu prakerja. Maka dapat di simpulkan bahwa, sesuai dengan hasil study literatur kebijakan fiskal yang ditinjau dari teori pembiayaan fungsional (*The Fuction Finance*) tahun 2019 sebelum wabah Covid-19 dan 2020 sesudah adanya wabah Covid-19, Indonesia sudah menerapkan kebijakan fiskal sesuai dengan teori pembiayaan fungsional (*The Fuction Finance*).

3. Realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan sesudah wabah covid-19 jika ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali (*The Managed Budget Approach*).

Kebijakan fiskal yang dilakukan di tahun 2019 yaitu pemerintah mengatur pengeluaran terkait dengan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dengan memfokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia dengan cara meningkatkan kualitas, dan relevansi Pendidikan vokasi, menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan layanan Kesehatan, dan tetap menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan nasional, selain itu pemerintah melakukan penguatan infrastruktur, dan mendorong efektivitas program perlindungan social, sehingga menyebabkan APBN mengalami defisit sebesar Rp296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB sesuai dengan defisit RAPBN tahun 2019. Namun di tahun 2020 karena adanya wabah Covid-19 Indonesia mengalami pelebaran defisit anggaran karena peningkatan belanja negara. Sehingga, menjadikan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan Perppu tersebut di jadikan landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengaturan APBN sebagai instrument utama dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Alokasi anggaran belanja negara digunakan untuk kebutuhan Kesehatan, jaring pengaman social, pemulihan ekonomi, terutama dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, dalam upaya

pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pemerintah melakukan beberapa kebijakan antara lain, pemerintah menanggung beban pajak PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan , pembebasan pajak penghasilan/PPh impor untuk 19 sektor tertentu, kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil, mengurangi PPh Pasal 25 sebesar 30 % bagi wajib KITE industry kecil menengah. Tarif PPh badan juga di turunkan menjadi 22% untuk menjamin ketersediaan barang pokok. Pemerintah juga memberi stimulus dalam bentuk kebijakan non fiskal, berupa penyederhanaan prosedur dan persyaratan ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem. Sesuai dengan hasil study literatur analisis kebijakan fiskal yang ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali (*The Managed Budget Approach*) pada tahun 2019 dan tahun 2020 pemerintah menerapkan kebijakan fiskal sesuai dengan teori pengelolaan anggaran terkendali (*The Managed Budget Approach*).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Badan Kebijakan Fiskal, dan diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang positif bagi Indonesia untuk mengetahui seberapa besar peranan Badan Kebijakan Fiskal

2. Bagi Akademis IAIN Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan yang mengenai kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Khususnya untuk pengembangan jurusan Ekonomi Syariah dan tambahan pustaka di perpustakaan IAIN Tulungagung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian dalam variabel dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam hal kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia. Sehingga bisa menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian- penelitian selanjutnya